



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**  
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas – Mamuju  
Email : [sulawesibarat.kepegawaian@gmail.com](mailto:sulawesibarat.kepegawaian@gmail.com)

---

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Pratama  
2. Pejabat Administrator  
3. Pejabat Pengawas  
4. Pejabat Fungsional  
5. Para Pelaksana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
di-  
Mamuju

**SURAT EDARAN  
NOMOR W.33-80.UM.01.01 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEGIATAN PERKANTORAN APARATUR SIPIL NEGARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
PASCA GEMPABUMI TEKTONIK**

1. Latar Belakang :

Sehubungan dengan kondisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pasca gempabumi tektonik, yang mengalami beberapa kerusakan pada sarana dan prasarana bekerja, serta beberapa fasilitas pendukungnya, dan belum diumumkan hasilnya hasil penilaian Tim Kementerian PUPR yang telah dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021, serta adanya surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 001/Darurat-SB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat, saat ini masih belum bisa dipastikan tentang penggunaan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi barat dalam waktu dekat untuk kegiatan dan aktifitas perkantoran, akan tetapi dalam rangka memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, aktifitas perkantoran tetap harus dijalankan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasca gempa.

Untuk itu, dipandang perlu mengatur aktivitas perkantoran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil rapat Pimpinan Tinggi Pratama yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama dan beberapa Pejabat Administrator pada hari

minggu, tanggal 24 Januari 2021, diputuskan untuk menerbitkan Edaran tentang aktifitas perkantoran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud:

Melaksanakan tertib perkantoran dan keamanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan asset negara dalam kondisi pasca gempa

### b. Tujuan :

Terlaksananya tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara dalam kondisi pasca gempa bumi dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan ASN.

## 3. Ruang Lingkup

Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

## 4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 001/Darurat-SB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
- c. Notula rapat pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi barat tanggal 24 Januari 2021.

## 5. Isi Surat Edaran

- a. Seluruh aktivitas perkantoran dilaksanakan di lantai satu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada bagian lobby dengan tetap waspada menjaga keselamatan;
- b. Pembersihan bekas reruntuhan pasca gempa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan seluruh Divisi, setelah status tanggap darurat dicabut dan mendapatkan rekomendasi hasil penilaian Kementerian PUPR dan/ atau BNPB diterbitkan;
- c. Seluruh ASN Kantor Wilayah tidak diperkenankan meninggalkan tempat (Kabupaten Mamuju) tanpa izin pimpinan;
- d. Seluruh ASN Kanwil diminta senantiasa melaporkan keberadaan dan kondisi terkini kepada atasan langsung;

- e. Untuk keselamatan dihimbau kepada seluruh ASN dan Mitra Kerja termasuk tamu agar tidak memasuki area lantai 2 gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
- f. Seluruh ASN diminta untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan termasuk tetap menjaga protocol kesehatan Covid-19

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua.



Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. Anwar N', written over a horizontal line.

H. M. Anwar N  
NIP. 196307021990031003

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Direktur Jenderal Hak Kekayaan intelektual;
8. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.